

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Teori Agensi*

Teori keagenan (*agency theory*) yaitu hubungan antara pemilik (principal) dan manajemen (agent). Teori agensi menyatakan bahwa apabila terdapat pemisahan antara pemilik sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen yang menjalankan perusahaan maka akan muncul permasalahan agensi karena masing-masing pihak tersebut akan selalu berusaha untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya (Jensen dan Meckling dalam Fajaryani Atik, 2015). Teori mengenai hubungan keagenan ini digunakan dalam rangka untuk memahami *corporate governance* lebih dalam. Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Fajaryani Atik 2015, terdapat dua macam bentuk hubungan keagenan, yaitu antara manajer dan pemegang saham (*shareholders*) serta antara manajer dan pemberi pinjaman (*bondholders*).

Pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan merupakan salah satu faktor yang memicu timbulnya konflik kepentingan yang disebut dengan konflik keagenan. Konflik keagenan yang timbul antara berbagai pihak yang memiliki beragam kepentingan dapat

menyulitkan dan menghambat perusahaan di dalam mencapai kinerja yang positif guna menghasilkan nilai bagi perusahaan itu sendiri dan juga bagi *shareholders*. (Jensen dan Meckling dalam Fajaryani Atik, 2015), menyatakan bahwa konflik keagenan yang terjadi dalam perusahaan bukan saja antara pemegang saham dengan manajer tetapi juga antara pemegang saham yang mengendalikan manajemen dan pemegang saham dalam jumlah kecil yang tidak bisa secara efektif mengendalikan manajemen. Eisenhardt (1989) dalam Astria (2011), menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (*riskaverse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia akan bertindak oportunistik, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya. Munculnya masalah agensi disebabkan oleh konflik kepentingan dan asimetri informasi tersebut dapat membuat perusahaan menanggung biaya keagenan (*agency cost*). Teori agensi menyatakan bahwa konflik kepentingan dan asimetri informasi yang muncul dapat dikurangi dengan mekanisme pengawasan yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan berbagai pihak di perusahaan (Jensen dan Meckling dalam Fajaryani Atik, 2015). Mekanisme pengawasan yang dimaksud dalam teori agensi dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme *corporate governance*. *Corporate governance* diharapkan bisa berfungsi sebagai alat

pengendali konflik kepentingan pihak-pihak yang terkait dan untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* yang semestinya atas investasi mereka terhadap perusahaan.

Penerapan *corporate governance* juga dapat meningkatkan kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan pemilik (pemegang saham), sehingga dapat meminimalkan konflik kepentingan dan biaya keagenan (*agency cost*). *Good corporate governance* menghasilkan berbagai mekanisme yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa tindakan manajemen sudah selaras dengan kepentingan pemegang saham (Astria, 2011).

Pihak independen dari luar perusahaan juga dibutuhkan dalam meminimalkan konflik agensi. Pihak ketiga yang independen diharapkan dapat bertindak sebagai mediator antara agen dan prinsipal. Pihak ketiga ini berfungsi untuk memonitor perilaku agen apakah sudah bertindak sesuai dengan keinginan principal. Auditor adalah pihak independen yang dianggap mampu mewakili sebagai mediator pihak *principal* dengan pihak agen dalam mengelola keuangan perusahaan. Auditor melakukan fungsi monitoring pekerjaan agen melalui laporan keuangan.

2.1.2 Signaling Theory

Signaling Theory mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan

oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik (Jamaan, 2008). Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain.

Menurut Jamaan (2008) teori sinyal menjelaskan bahwa pemberian sinyal dilakukan oleh manajer untuk mengurangi asimetri informasi. Manajer memberikan informasi melalui laporan keuangan bahwa mereka menerapkan kebijakan akuntansi konservatisme yang menghasilkan laba yang lebih berkualitas karena prinsip ini mencegah perusahaan melakukan tindakan membesar-besarkan laba dan membantu pengguna laporan keuangan dengan menyajikan laba dan aset yang tidak overstate.

Menurut Bringham dalam Jamaan (2008), integritas informasi laporan keuangan yang mencerminkan nilai perusahaan merupakan sinyal positif yang dapat mempengaruhi opini investor dan kreditor atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dalam *signaling theory*, pengeluaran investasi memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang, sehingga meningkatkan harga saham sebagai indikator nilai perusahaan. Sinyal opini bebas diperlukan untuk memastikan pihak-pihak yang berkepentingan menyakini keandalan informasi keuangan yang disampaikan pihak perusahaan.

2.1.3 Laporan keuangan

Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara manajemen

dengan pihak luar perusahaan berkaitan dengan data keuangan atau aktivitas perusahaan tersebut selama periode tertentu. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2012) dalam PSAK NO.1 mengemukakan bahwa tujuan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi yang menunjukkan pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan ekonomi oleh para pengguna laporan keuangan apabila informasi yang tercantum dalam laporan keuangan tersebut memenuhi karakteristik kualitatif informasi akuntansi. Dalam *Statement of Financial Accounting Concept* (SFAC) No.2 mengenai *Qualitative Characteristic OF Accounting Information*, terdapat dua hal yang menjadi kualitas primer dalam suatu laporan keuangan, yaitu relevansi (*relevance*) dan keandalan (*reliability*) (Kieso dan Weygandt, 1992 dalam Astria, 2011). Relevansi merujuk pada kemampuan informasi akuntansi perusahaan untuk mempengaruhi keputusan pembaca laporan keuangan dengan mengubah atau membantu mengkonfirmasi harapan merek tentang hasil atau konsekuensi suatu tindakan/kejadian. Relevansi informasi dapat diukur dalam kaitannya dengan maksud penggunaan informasi tersebut. Artinya jika satu informasi tidak

relevan dengan kebutuhan pengambil keputusan, maka informasi akuntansi yang dapat diandalkan, yaitu informasi akuntansi yang bebas dari kesalahan dan penyimpangan serta merupakan suatu penyajian yang jujur.

Laporan keuangan memiliki informasi yang dibutuhkan yang nantinya akan digunakan oleh berbagai pihak, termasuk manajemen perusahaan itu sendiri. Laporan keuangan menjadi alat utama bagi perusahaan untuk menyampaikan informasi keuangan mengenai pertanggungjawaban pihak manajemen. Namun pihak yang paling berkepentingan dengan laporan keuangan sebenarnya adalah para pengguna eksternal (diluar manajemen). Pengguna eksternal berada dalam kondisi yang paling besar ketidakpastiannya sehingga membutuhkan laporan keuangan untuk mengetahui kinerja perusahaan.

Laporan keuangan dikatakan berintegritas apabila laporan keuangan tersebut memenuhi kualitas reliability (Kieso dalam Astria 2011) dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Reliability memiliki kualitas sebagai berikut:

a) *Verifiability*

Laporan keuangan suatu entitas yang mempunyai kondisi yang sama dengan laporan keuangan entitas lain, akan mendapat opini yang sama jika diaudit oleh auditor yang berbeda.

b) Representational faithfulness

Angka dan keterangan yang disajikan sesuai dengan apa yang ada dan benar benar terjadi.

c) Neutrality

Informasi dari laporan keuangan harus diarahkan untuk kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan berlawanan.

Menurut SAK (20012:2-3), pemakai laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, serta lembaga-lembaga, dan masyarakat. Pemakai laporan keuangan menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berbeda seperti sebagai berikut:

a) Investor

Penanaman modal pada sebuah perusahaan, seorang investor menghadapi berbagai risiko dan penasihat investor juga berkepentingan dengan risiko yang melekat pada hasil pengembangan dari investasi yang dilakukan sehingga mereka membutuhkan informasi untuk menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut.

b) Karyawan

Karyawan membutuhkan informasi mengenai profitabilitas dan stabilitas perusahaan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, imbalan paska kerja, serta kemampuan kerja.

c) Kreditur Usaha Lainnya dan Pemasok

Kreditur usaha lainnya dan pemasok membutuhkan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah kewajiban akan dibayar pada saat jatuh tempo. Dibandingkan pemberi pinjaman, kreditur usaha memberikan pinjaman dengan jangka waktu yang lebih pendek kecuali apabila perusahaan sebagai pelanggaran utama sehingga mereka bergantung pada kelangsungan hidup perusahaan.

d) Pemberi Pinjaman

Pemberi pinjaman membutuhkan informasi keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar pinjaman serta bunganya pada saat jatuh tempo.

e) Masyarakat

Perusahaan yang mempengaruhi masyarakat dengan berbagai cara, misalnya pemberian kontribusi yang tinggi pada perekonomian nasional sehingga laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan kecenderungan dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya.

f) Pemerintah

Pemerintah berkepentingn atas informasi guna mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak, seta untuk menyusun statistic pendapatan nasional dan statistik lainnya.

g) Pelanggan

Pelanggan membutuhkan informasi berkaitan dengan kelangsungan hidup perusahaan, terutama apabila mereka memiliki perjanjian jangka panjang atau memiliki kebergantungan yang tinggi pada perusahaan.

2.1.4 *Integritas Laporan Keuangan*

Integritas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur. Jamaan (2008) mendefinisikan bahwa integritas adalah prinsip moral yang tidak memihak, jujur, seseorang yang berintegritas tinggi memandang fakta seperti apa adanya dan mengemukakan fakta tersebut seperti apa adanya.” Integritas laporan keuangan diukur dengan menggunakan indeks *conservatism* yang dikemukakan oleh Penmann dan Zhang (2002) dalam Saksotama (2014)”.

Ukuran integritas laporan keuangan selama ini belum ada walaupun demikian secara intuitif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu diukur dengan konservatisme serta keberadaan manipulasi laporan keuangan yang biasanya diukur dengan manajemen laba. Menurut Jamaan (2008) laporan keuangan yang *reliable* atau berintegritas dapat

dinilai dengan cara penggunaan prinsip konservatisme dan penggunaan *earning management* karena informasi dalam laporan keuangan akan lebih *reliable* apabila laporan keuangan tersebut konservatif dan laporan keuangan tersebut tidak *overstate* supaya tidak ada pihak yang dirugikan akibat informasi dalam laporan keuangan tersebut. Menurut Linata dan Sugiarto (2012), dari perspektif perilaku oportunistik teori akuntansi positif, perusahaan yang mengalami kegagalan manajemen akan menutupi masalah kinerja perusahaan dengan meningkatkan pendapatan serta aktiva bersih, maka untuk menghindari manipulasi, praktek akuntansi yang konservatif dibutuhkan. Oleh karena itu, konservatisme dirasa tepat digunakan sebagai ukuran dari integritas laporan keuangan.

2.1.4.1 Cara mengukur Integritas Laporan Keuangan

(Mayangsari dan Tia Astria, 2011: 10) berpendapat bahwa integritas laporan keuangan dapat diukur dengan prinsip konservatisme dan manajemen laba (*earning management*). Hal tersebut karena informasi yang ada pada laporan keuangan akan lebih berintegritas apabila laporan keuangan tersebut konservatif dan tidak *overstate* sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dengan penyajian informasi yang ada didalam laporan keuangan tersebut.

2.1.5 *Kepemilikan Institusional*

Baridwan (2014) mengemukakan kepemilikan institusional adalah proporsi saham yang dimiliki oleh suatu lembaga atau institusi. Kepemilikan saham ditunjukkan dengan persentase jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh investor institusi. Kehadiran kepemilikan institusional memiliki peran yang penting karena kepemilikan institusional akan mendorong adanya peningkatan dalam pengawasan yang lebih optimal terhadap manajemen. Kepemilikan institusional mempunyai kemampuan dalam mengendalikan dan memonitoring manajemen secara efektif agar dapat meningkatkan kinerja manajemen. *Beiner et al* (2003) dalam Tia Astria (2011) menyatakan bahwa kepemilikan institusional menunjukkan pengaruh keberadaan pemegang saham institusional terhadap kinerja manajemen terkait dengan pelaporan keuangan perusahaan dan juga menunjukkan persentase hak suara institusi. Investor institusional seharusnya lebih dapat menggunakan informasi periode sekarang untuk memprediksi keuntungan yang akan didapat pada periode mendatang dibandingkan dengan investor non institusional (Herawaty, 2008).

Jensen dan Meckling (1976) dalam Fajaryani Atik (2015), menyatakan bahwa semakin besar persentase saham yang dimiliki oleh kepemilikan institusional akan menyebabkan aktivitas pengawasan menjadi semakin efektif karena dapat mengendalikan perilaku oportunistik yang dilakukan oleh para manajer. Tindakan pengawasan

yang dilakukan tentu akan berdampak pada penyajian laporan keuangan, dimana manajer harus menyajikan laporan keuangan secara transparan dan wajar. Penyajian laporan keuangan yang transparan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan. Peningkatan integritas laporan keuangan tentu membuat investor dan calon investor yakin ketika ingin menanamkan dananya di perusahaan tersebut.

2.1.6 Kepemilikan Manajerial

Persentase saham yang dimiliki oleh manajemen termasuk didalamnya persentase saham yang dimiliki oleh manajemen secara pribadi maupun dimiliki oleh anak cabang perusahaan bersangkutan beserta afiliasinya (Yani dan Ketut, 2014). Kepemilikan perusahaan merupakan salah satu mekanisme yang dipergunakan agar pengelola melakukan aktivitas sesuai kepentingan pemilik perusahaan.

Komposisi kepemilikan berkaitan erat dengan siapakah pemegang saham, dan yang lebih penting adalah siapa diantara pemegang saham ke dalam kelompok pengendali. Kepemilikan saham manajerial merupakan persentase saham yang dimiliki oleh anak cabang perusahaan bersangkutan beserta afiliasinya.

Kepemilikan manajerial juga dapat berperan di dalam membatasi perilaku menyimpang oleh manajemen perusahaan. Kepemilikan manajerial menjadi salah satu mekanisme yang dapat diterapkan untuk meningkatkan integritas laporan keuangan. Dengan

adanya kepemilikan manajerial, manajer akan cenderung bertindak untuk kepentingan pemegang saham karena mereka juga merupakan bagian dari pemegang saham, antara lain dengan tidak memanipulasi informasi yang ada dalam laporan keuangan.

2.1.7 Komite Audit

Komite audit adalah badan yang dibentuk oleh dewan direksi untuk mengaudit operasi dan keadaan. Badan ini bertugas memilih dan menilai kinerja perusahaan kantor akuntan publik. (Desi, 2012).

Komite audit adalah suatu badan yang dibentuk didalam perusahaan klien yang bertugas untuk memelihara independensi akuntan pemeriksa terhadap manajemen. (Supriyono, 1988) dalam Ida dan Dewa (2013) Komite audit berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian intern. Tujuan pembentukan komite audit adalah:

1. Memastikan laporan keuangan yang dikeluarkan tidak menyesatkan dan sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku umum.
2. Memastikan bahwa internal kontrolnya memadai.
3. Menindak lanjuti terhadap dugaan adanya penyimpangan yang meterial di bidang keuangan dan implikasi hukumnya.
4. Merekomendasikan seleksi auditor eksternal.

Salah satu cara auditor mempertahankan independensinya adalah dengan membentuk komite audit (Desi, 2012). Sesuai dengan fungsi komite audit di atas, sedikit banyak keberadaan komite audit dalam perusahaan berpengaruh terhadap kualitas dan integritas laporan keuangan yang dihasilkan.

2.1.8 *Komisaris Independen*

Komisaris independen adalah sebuah badan dalam perusahaan yang biasanya beranggotakan dewan komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan. Komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait.

Keberadaan komisaris independen pada suatu perusahaan memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen. Hal ini dikarenakan keberadaan komisaris independen dalam perusahaan berfungsi untuk mengawasi dan melindungi pihak-pihak diluar manajemen perusahaan, menjadi penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen, sehingga komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta

perusahaan yang *good corporate governance* dan menghasilkan laporan keuangan yang berintegritas tinggi.

2.1.9 Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian *intern* yang memiliki tanggung jawab untuk memonitoring tindakan manajemen puncak (Panggabean, 2016). Berkaitan dengan ukuran dewan komisaris semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan memonitoring yang dilakukan akan semakin efektif. Dikaitkan dengan integritas laporan keuangan, maka tekanan terhadap manajemen akan semakin besar untuk mengungkapkannya.

Penelitian dapat menyimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris adalah bagian dari organ perusahaan yang melakukan pengawasan khusus maupun umum untuk melakukan pengendalian terhadap manajemen.

2.1.10 Ukuran Perusahaan

Kim (2003) dalam Sinaga (2014) mengatakan bahwa membagi ukuran perusahaan menjadi 3 yaitu small (kecil), medium (sedang) dan large (besar) berdasarkan market value perusahaan. Ukuran perusahaan dapat menunjukkan seberapa besar informasi yang terdapat di dalamnya, serta mencerminkan kesadaran dari pihak manajemen

mengenai pentingnya informasi, baik bagi pihak eksternal perusahaan maupun pihak internal perusahaan.

Perusahaan yang berukuran besar memiliki peran penting sebagai pemegang kepentingan yang luas. Hal ini membuat kebijakan perusahaan besar akan memberikan dampak yang luas terhadap kepentingan publik dibandingkan perusahaan kecil (Ningsaptiti, 2010). Perusahaan besar lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan.

2.1.11 Leverage

Kasmir (2012: 151) berpendapat bahwa *leverage* adalah perhitungan yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya. Dalam arti luas dikatakan leverage digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi). Perusahaan dengan leverage yang tinggi berarti perusahaan memiliki resiko keuangan yang tinggi karena mengalami kesulitan keuangan yang disebabkan hutang yang tinggi untuk membiayai aktivasnya. Rasio hutang terhadap ekuitas yang tinggi menunjukkan tingginya resiko keuangan perusahaan.

Kesulitan perusahaan dalam keuangan ini merupakan kondisi yang dinilai buruk oleh masyarakat. Gayatri dan Suputra (2013) menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami rugi cenderung memerlukan auditor untuk memulai proses pengauditan lebih lambat dari biasanya. Hal ini menunjukkan bahwa resiko keuangan yang tinggi akan memperlambat manajemen untuk menginformasikan kinerja perusahaan dan meningkatkan upaya kecurangan untuk memanipulasi laporan keuangan.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai integritas laporan keuangan telah dilakukan oleh banyak peneliti. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini merujuk dari beberapa penelitian terdahulu. Berikut ini merupakan kesimpulan dari beberapa penelitian terdahulu:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Judul	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Struktur Kepemilikan, Komite Audit, Komisaris Independen, dan Dewan Direksi Terhadap Integritas Laporan Keuangan	Yani dan Ketut (2014)	<p>1. Variabel Dependen: Integritas Laporan Keuangan.</p> <p>2. Variabel Independen: Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, dan beberapa direktur</p>	<p>1. Komite audit, komisaris independen, dan kepemilikan managerial tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.</p> <p>2. Kepemilikan institusional dan dewan direksi</p>

			anggota Komite audit.	berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.
2.	Pengaruh Reputasi Auditor dan Mekanisme <i>Corporate Governance</i> terhadap Integritas Laporan Keuangan	Fitri dan Rochmi (2014)	<p>1. Variabel Dependen: Integritas Laporan Keuangan</p> <p>2. Variabel Independen: Reputasi Auditor, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Managerial.</p>	<p>1. Kepemilikan institusional dan kepemilikan managerial tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.</p> <p>2. Komisaris independen dan reputasi auditor berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.</p>
3.	Analisis Pengaruh Audit Tenure, Struktur corporate Governance dan ukuran KAP terhadap Integritas Laporan Keuangan	Tia Astria (2011)	<p>1. Variabel dependen: Integritas Laporan keuangan</p> <p>2. Variabel Independen: Audit Tenure, Struktur Corporate Governance (kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, komite audit, komisaris independen), Ukuran KAP Sampel dan populasi: perusahaan manufaktur 2007-2009</p>	<p>1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur corporate governance (kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, komisaris independen) dan ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan.</p> <p>2. Sementara itu, audit tenure tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan</p>

				keuangan.
4.	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan, dan <i>Leverage</i> terhadap Integritas Laporan Keuangan	Ida dan Dewa (2013)	<p>1. Variabel Dependen: Integritas Laporan Keuangan</p> <p>2. Variabel Independen: Corporate Governance (Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Komite Audit), Ukuran Perusahaan, dan Leverage.</p>	<p>1. Komite audit, komisaris independen, ukuran perusahaan, dan leverage berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan</p> <p>2. Sedangkan Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan.</p>
5.	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, dan Komite Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan	Desi (2012)	<p>1. Variabel Dependen: Integritas Laporan Keuangan</p> <p>2. Variabel Independen: Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, dan Komite Audit</p>	<p>1. Kepemilikan institusional dan komisaris independen berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan.</p> <p>2. Sedangkan Komite audit berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan.</p>
6.	Pengaruh Good Corporate Governance dan Leverage terhadap Integritas Laporan Keuangan	Latifah (2015)	<p>1. Variabel Dependen: Integritas Laporan Keuangan</p> <p>2. Variabel Independen: Good Governance dan leverage</p>	<p>1. Good corporate governance yang diukur dengan kepemilikan institusional tidak mempunyai pengaruh terhadap integritas laporan keuangan.</p> <p>2. Sedangkan</p>

				leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan.
7.	Pengaruh Corporate Governance, Audit Tenure dan Spesialisasi Industri Auditor Terhadap Integritas Laporan Keuangan	Nur wahyuni dan fitriyani (2011)	<p>3. Variabel Dependen:</p> <p>Integritas Laporan Keuangan</p> <p>1. Variabel Independen:</p> <p>Struktur Corporate Governance (Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komite Audit), Audit Tenure, dan Spesialisasi Industri Auditor.</p>	<p>1. Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit dan audit tenure tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan.</p> <p>2. Sedangkan spesialisasi auditor berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan.</p>
8.	Determinasi Integritas Laporan Keuangan	Rozania, Ratna, Marsellia (2013)	<p>4. Variabel Dependen:</p> <p>Integritas Laporan Keuangan</p> <p>2. Variabel Independen:</p> <p>Struktur Corporate Governance (Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komite Audit), Audit Tenure, dan Spesialisasi Industri</p>	<p>1. Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan audit tenure tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan.</p> <p>1. Sedangkan komite audit, komisaris independen spesialisasi auditor di bidang industri klien</p>

			Auditor.	berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan.
--	--	--	----------	--

Sumber : Penelitian Terdahulu

2.3 Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini variabel yang diteliti diantaranya adalah Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, Komisaris Independen, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan dan *Leverage* sebagai variabel independen. Sedangkan integritas laporan keuangan sebagai variabel dependen.

Integritas laporan keuangan merupakan tanggung jawab dua entitas yang terlibat dalam pelaporannya, yaitu manajemen perusahaan selaku pihak internal perusahaan dan akuntan publik selaku pihak eksternal yang mengaudit dan memberikan opini pada laporan keuangan perusahaan (Linata & Sugiarto, 2012). Jika kedua entitas tersebut dapat bekerja secara jujur serta independen, maka akan terciptanya integritas laporan keuangan.

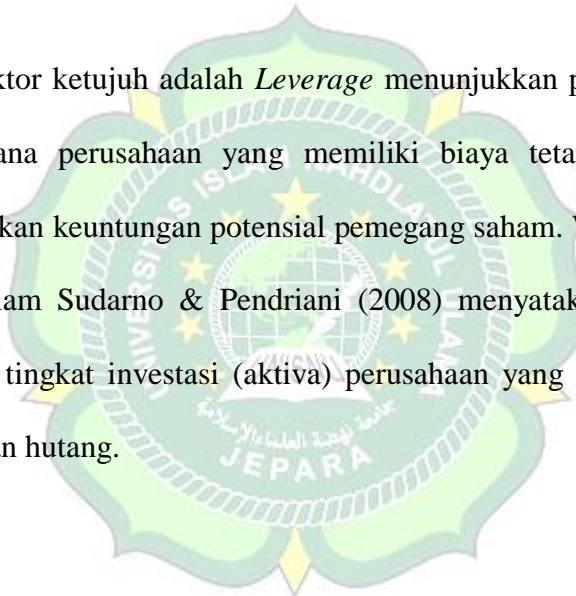
Struktur *corporate governance*, sebagai faktor pertama yang meningkatkan integritas laporan keuangan terdiri dari lima proksi, proksi pertama yaitu Kepemilikan Institusional, yang memiliki tujuan untuk menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan. Konflik kepentingan terjadi karena terdapat kepemilikan sentral atau terpusat suatu perusahaan yang dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan yang disajikan. Proksi kedua adalah Kepemilikan Manajemen, yang berfungsi sebagai

penyeimbang dalam kepemilikan saham (Yani dan Ketut, 2014). Adanya keikutsertaan manajemen di dalam pengambilan keputusan perusahaan dapat memotivasi manajemen dalam meningkatkan kinerja perusahaan dan menselaraskan tujuan antara agent dan principal sehingga diharapkan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan. Proksi ketiga yaitu Komite audit berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian intern. Proksi keempat adalah komisaris independen, komisaris independen pada suatu perusahaan memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen. Hal tersebut dikarenakan keberadaan komisaris independen dalam perusahaan berfungsi untuk mengawasi serta melindungi pihak-pihak diluar manajemen perusahaan, menjadi penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen, sehingga komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance* dan menghasilkan laporan keuangan yang berintegritas tinggi. Proksi kelima adalah ukuran dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian *intern* yang memiliki tanggung jawab untuk memonitoring tindakan manajemen puncak (Panggabean, 2016).

Selain Struktur *coorporate governance* yang terdiri dari Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, komite Audit,

komisaris Independen, dan Ukuran Dewan Komisaris, faktor keenam adalah *Firm size* (ukuran Perusahaan) juga merupakan faktor yang memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Perusahaan besar biasanya lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga mereka lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan (Ningsaptiti, 2010). Oleh karena itu, perusahaan besar cenderung memberi sinyal positif kepada masyarakat. Sehingga laporan keuangan yang disajikan mempunyai yang integritas tinggi.

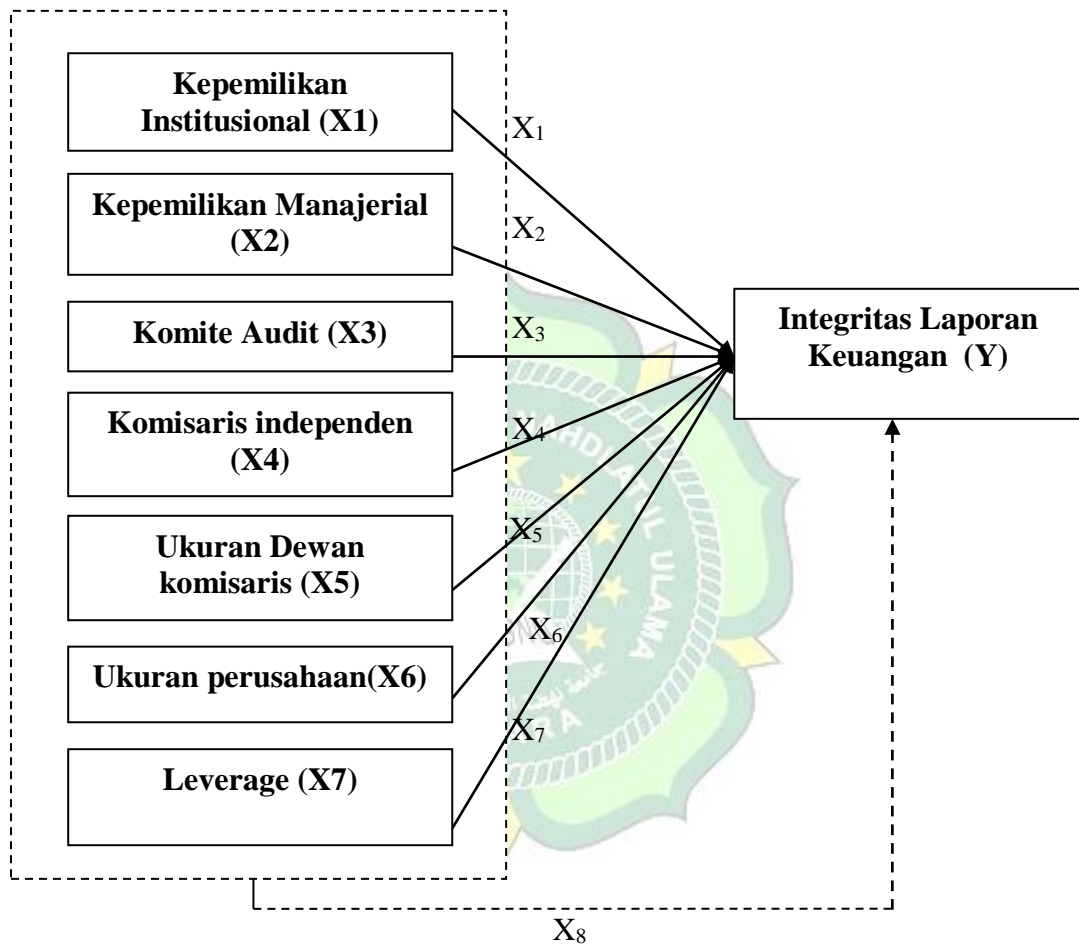
Faktor ketujuh adalah *Leverage* menunjukkan penggunaan aset dan sumber dana perusahaan yang memiliki biaya tetap dengan maksud meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Weston dan Coplan (1995) dalam Sudarno & Pendriani (2008) menyatakan rasio *Leverage* mengukur tingkat investasi (aktiva) perusahaan yang telah dibiayai oleh penggunaan hutang.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Berikut adalah skema kerangka Pemikiran



2.4 Perumusan Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang teoritis yang sudah dijelaskan diatas, hipotesis dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

2.4.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Integritas Laporan Keuangan.

Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga lain. Tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku *opportunistic* atau mementingkan diri sendiri (Jamaan, 2008).

Kepemilikan Institusional adalah persentase hak suara yang dimiliki oleh institusi. Gideon dalam penelitian (Astria, 2011) menyatakan bahwa persentase saham tertentu yang dimiliki institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen. Tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku *opportunistic* atau mementingkan diri sendiri.

Kepemilikan Institusional yang tinggi membatasi manajer dalam melakukan pengelolaan laba dan dapat meningkatkan Integritas Laporan Keuangan. Hal ini berarti bahwa Kepemilikan Institusional dalam perusahaan dapat meningkatkan monitoring terhadap perilaku manajer dalam mengantisipasi manipulasi yang mungkin dilakukan sehingga dapat meningkatkan integritas laporan keuangan.

Kepemilikan Institusional diukur dengan persentase antara saham yang dimiliki oleh institusi dibagi dengan banyaknya saham yang beredar. Berdasarkan rangkaian penjelasan diatas, maka hipotesis alternatif yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

H1 : Kepemilikan Institusional Berpengaruh Signifikan terhadap Integritas Laporan Keuangan.

2.4.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Integritas Laporan Keuangan.

Jama'an (2008) menemukan bahwa Kepemilikan Manajerial berhasil menjadi mekanisme dalam mengurangi masalah keagenan dari manajer dengan menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham. Meningkatnya proporsi saham yang dimiliki oleh manajer dapat mengurangi resiko tindakan manipulasi.

Kepemilikan saham yang besar dapat mengikutsertakan manajer secara langsung untuk merasakan manfaat dari keputusan yang telah diambil serta menanggung konsekuensi dalam pengambilan keputusan yang salah. Kepemilikan oleh manajer dapat menentukan kebijakan dan pengambil keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola. Dengan demikian, manajer pada perusahaan yang memiliki persentase kepemilikan manajerial akan cenderung memiliki tanggung jawab lebih besar dalam menjalankan perusahaan, mengambil keputusan terbaik untuk kesejahteraan perusahaan, dan melaporkan laporan keuangan dengan

informasi yang benar dan jujur sehingga memiliki integritas laporan keuangan yang tinggi. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H2 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap Integritas Laporan Keuangan.

2.4.3 Pengaruh Komite Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan.

Pada kegiatan pelaporan keuangan, komite audit bertugas memonitor serta mengawasi audit laporan keuangan dan memastikan agar standar dan kebijakan keuangan yang berlaku telah terpenuhi, memeriksa ulang laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan standar dan kebijaksanaan tersebut dan apakah telah konsisten dengan informasi lain yang diketahui oleh anggota komite audit, serta menilai mutu pelayanan dan kewajaran biaya yang diajukan auditor eksternal.

Keberadaan komite audit bermanfaat untuk menjamin transparansi, keterbukaan pada laporan keuangan, keadilan untuk semua stakeholder dan pengungkapan semua informasi yang dilakukan oleh manajemen meski ada konflik kepentingan. Dengan demikian, komite audit dalam perusahaan dapat menjadi salah satu upaya dalam mengurangi manipulasi dalam penyajian informasi akuntansi sehingga keintegritasan laporan keuangan dapat meningkat. Dengan demikian hipotesis yang diajukan:

H3 : Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap Integritas Laporan Keuangan.

2.4.4 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Integritas Laporan Keuangan.

Dewan komisaris memiliki fungsi untuk memonitoring terhadap kinerja manajer. Namun seringkali fungsi pengendalian terhadap direksi belum bisa dilaksanakan dengan baik. Salah satu penyebabnya adalah pola kepemilikan mayoritas perusahaan di Indonesia masih bersifat terkonsentrasi oleh pemegang saham pengendali, sehingga dewan komisaris gagal mewakili kepentingan *stakeholder* lainnya yang notabene memiliki kepemilikan lebih kecil, selain kepentingan pemegang saham mayoritas. Oleh karena itu, untuk menjamin perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait serta pelaksanaan *Good Corporate Governanace (GCG)*, maka perlu dibentuk komisaris independen.

Komisaris independen adalah sebuah badan dalam perusahaan yang biasanya beranggotakan dewan komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan yang memiliki fungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan (Astria, 2011). Tujuan dari Komisaris independen yaitu untuk menyeimbangkan pengambilan keputusan yang tidak memihak.

Berjalannya fungsi komisaris independen dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait, menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen pada suatu perusahaan dapat membantu mengatasi masalah agensi yang mungkin terjadi. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan tidak hanya memihak sebagian pihak, namun dapat mencakup seluruh pihak yang berkepentingan. Dari penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap Integritas Laporan Keuangan.

2.4.5 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Integritas Laporan Keuangan.

Dewan komisaris merupakan wakil *Shareholder* dalam sebuah perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas yang berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen. Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan memonitoring kegiatan manajemen. Hipotesis yang kelima yang diajukan dalam penelitian ini adalah ukuran dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap integritas laporan keuangan perusahaan

H5: Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap Integritas Laporan Keuangan.

2.4.6 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Integritas Laporan Keuangan.

Ukuran perusahaan atau Firm Size yaitu rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun (Brigham dan Houston, 2001) dalam Ningsaptiti (2010), ukuran perusahaan menunjukkan jumlah pengalaman serta kemampuan tumbuhnya perusahaan yang mengindikasikan adanya kemampuan tingkat risiko dalam mengelola investasi yang diberikan para stakeholders. Perusahaan dengan ukuran besar diasumsikan dengan jumlah aktiva dan tingkat pendapatan yang besar sehingga menghasilkan laba yang tinggi (Ida dan Dewa, 2013). Diasumsikan bahwa perusahaan-perusahaan besar memiliki tingkat integritas yang tinggi karena dianggap mampu dalam menghadapi ancaman persaingan global yang semakin ketat.

Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan. Informasi mengenai ukuran perusahaan merupakan suatu sinyal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi dan para investor dapat menilai bahwa perusahaan benar-benar menyajikan informasi yang sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya (integritas laporan keuangan) sehingga investor yakin ketika ingin menanamkan dananya di perusahaan tersebut. Perusahaan yang dapat bertahan dari ancaman, seperti krisis ekonomi termasuk perusahaan yang tangguh serta memiliki kondisi keuangan yang kuat. Dengan

kondisi keuangan yang kuat tersebut, maka integritas laporan keuangan juga meningkat di mata investor. Dari penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H6 : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Integritas Laporan Keuangan.

2.4.7 Pengaruh *Leverage* terhadap Integritas Laporan Keuangan.

Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi berarti perusahaan memiliki resiko keuangan yang tinggi pula hal ini dikarena perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang disebabkan oleh hutang yang tinggi untuk membiayai aktivitya. *Modugu et al* (2012) menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami rugi cenderung memerlukan auditor untuk memulai proses pengauditan lebih lambat dari biasanya. Hal ini menunjukkan bahwa resiko keuangan yang tinggi akan memperlambat manajemen untuk menginformasikan kinerja perusahaan dan meningkatkan upaya kecurangan untuk memanipulasi laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dibuat adalah:

H7: *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap Integritas Laporan Keuangan.

2.4.8 Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, Komisaris Independen, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan dan *Leverage* berpengaruh terhadap Integritas Laporan Keuangan.

Kepemilikan Institusional yaitu persentase hak suara yang dimiliki oleh institusi. Gideon dalam penelitian (Astria, 2011) menyatakan bahwa persentase saham tertentu yang dimiliki institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akrealisasi sesuai kepentingan pihak manajemen.

Kepemilikan manajerial berperan di dalam membatasi perilaku menyimpang yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Kepemilikan manajerial adalah salah satu mekanisme yang dapat diterapkan untuk meningkatkan integritas laporan keuangan.

Komite audit yaitu suatu badan yang dibentuk didalam perusahaan klien yang bertugas untuk memelihara independensi akuntan pemeriksa terhadap manajemen.

Keberadaan komisaris independen pada sebuah perusahaan memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen. Hal ini dikarenakan keberadaan komisaris independen dalam perusahaan berfungsi untuk mengawasi serta melindungi pihak-pihak diluar manajemen perusahaan.

Ukuran dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian intern yang memiliki tanggung jawab untuk memonitoring tindakan manajemen puncak

Ukuran perusahaan dapat menunjukkan seberapa besar informasi yang terdapat di dalamnya, serta mencerminkan kesadaran dari pihak manajemen mengenai arti pentingnya informasi, baik bagi pihak eksternal perusahaan maupun pihak internal perusahaan.

Leverage adalah perhitungan yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya

H8: Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, Komisaris Independen, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan dan *Leverage* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Integritas Laporan Keuangan.